BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, pembagian hukum pidana umum (tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana khusus (tercantum dalam perundang-undangan di luar KUHP). Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa di maknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)¹.

Salah satu hukum pidana khusus adalah hukum tentang penyalahgunaan narkoba, tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan hal yang dianggap serius oleh pemerintah karena penyalahgunaan narkoba yang berlebihan dikalangan masyarakat sangat membahayakan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dikenal dengan nama Bakolak Inpres, namun dengan alasan kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba,

---

¹Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 8

karena penerapan dan pelaksanaan dari pada undangundang ini masih banyak kelemahannya, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 direvisi sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi Narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat². Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang

---

²Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1

bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu diantaranya yaitu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana³. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *Pertama* memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, *Kedua* menegakkan hukum dan *Ketiga* memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam undang-undang kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian yakni sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Untuk itu sangat disayangkan jika ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di tingkatan daerah maupunditingkatan pusat terdapat personil kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba tentu mencoreng citra kepolisian, Pasalnya polisi yang seharusnya ikut

---

³*Ibid*, hlm. 13

memberantas peredaran narkoba tetapi yang terjadi justru yang sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi musuh dalam selimut dalam upaya memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang.

Kasus penyalahgunaan narkoba ini juga terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Kabupaten Tanjung Jabung Barat, beliau menjelaskan bahwa 39 kasus penyalahgunaan narkoba yang telah berhasil diungkap telah terkumpul barang bukti sabu seberat 52,47 gram dan ganja 2.082,67 gram dengan 51 tersangka, dan yang menjadi tersangka tersebut beberapanya adalah anggota kepolisian yaitu sebanyak 6 orang⁴.

Tabel
Jumlah Polisi yang Terlibat Kasus Penyalahgunaan Narkoba di
wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka
1.	2016	2 Kasus	2 Tersangka
2.	2017	2 Kasus	2 Tersangka
3.	2018	1 Kasus	1 Tersangka
4.	2019	1 Kasus	1 Tersangka
5.	2020	Nihil	Nihil
6.	2021	Nihil	Nihil

Sumber Data dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjab Barat tahun 2016-2021.

Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian juga dibatasi oleh undang-undang dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Setiap anggota kepolisian harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota kepolisian

---

⁴ *Wawancara* dengan Kasat Narkoba AKP. Deny Mulyadi Polres Tanjung Jabung Barat, 3 Juli 2020, Bertempat di Polres Tanjung Jabung Barat

seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Instiusional Peradilan Umum Anggota Polri. Jika anggota kepolisian melakukan suatu tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan aturan-aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

Untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan POLRI) sebagai salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dan tegas terhadap setiap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan penegak hukum itu sendiri dalam hal ini anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai kaedah hukum

yang berlaku. Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat disebabkan oleh factor keluarga dan faktor pergaulan⁵.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak kasus terungkap tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian salah satunya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2016 sampai tahun 2021 sebanyak 6 org, hal ini menjadi sangat memprihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika di negara ini. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental dan juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Hal tersebut dibuktikan pada kasus penyalhgunaan narkotika oleh anggota Polri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Proses penyidikan oleh Polri terhadap anggota Polri yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika sesuai dengan hasil penuntutan, namun hasil keputusan di Pengadilan Negeri lebih ringan jatuhnya hukumannya dibanding hasil tuntutan dari Polri.

Secara umum mekanisme dan proses penegakan hukum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya saja pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan⁶.

---

⁵ *Wawancara* dengan Bapak AKP. Imron Teheri, Kasat Narkotika Polisi Resort Tanjung Jabung Barat 3 Juli 2020, Bertempat di Polres Tanjung Jabung Barat

⁶*ibid*

Selain itu yang membedakan adalah setelah personil kepolisian yang melakukan tindak pidana mendapatkan putusan hukum tetap, selanjutnya personil kepolisian tersebut diajukan kesidang Kode Etik Kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian dan telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian. Dengan ancaman hukuman dapat berupa penundaan pangkat sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas kepolisian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewangga mengatakan bahwa :

Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai ditingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum⁷.

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widodo mengatakan bahwa :

Proses penegakan hokum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam proses bahwa semua orang dimata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bias lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hokum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan

---

⁷ Wisnu Jati Dwangga, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian, Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali, *Jurnal Jurisprudence*, 2014. 4 (2) 65-74, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4204>

tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika⁸.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan studi kasus yang berbeda bahwa Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun untuk penelitian ini belum diketahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.**

B. Rumusan Masalah

Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini adalah proses penyidikan oleh Polri terhadap anggota Polri yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika sesuai dengan hasil penuntutan, namun hasil keputusan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal lebih ringan jatuhnya hukumannya dibanding hasil tuntutan dari jaksa penuntut umum. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

---

⁸Dwi Indah Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2018. 1 (1) 1-10 <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/1762>

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal?

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Secara Praktis bagi pihak Polres, penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam menangani

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian dan masalah sosial lainnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dalam penulisan skripsi ini dan untuk mempermudah pembahasan, maka terlebih dahulu penulis mengartikan beberapa kata dari judul diatas, yaitu

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah : “proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”⁹.

2. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan NAPZA pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu NAPZA¹⁰.

---

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2021, hlm. 15

¹⁰Tasya Nafisatul Hasan, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13026>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 15 menyatakan: “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Berdasarkan konsep yang telah penulis uraikan di atas maka adapun maksud dari skripsi ini adalah : Untuk mengetahui proses pelaksanaan penegakan hukum anggota Polri yang tersangkut perkara Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

E. Landasan Teoretis

Hukum adalah Tata aturan (order) sebagai suatu system aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidakmenunjuk pada pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, “penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan”.¹² Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pengejawantahan

---

¹¹ Jimly A Shidique, *et.al. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 13

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru,Bandung, 1993, hlm. 15

dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.¹³

Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu *pertama* Peraturan perundang-undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi sipelanggar, *kedua* penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksa atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. *Ketiga* masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum.¹⁴

Secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Preventif, yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:
  - 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstarcto* oleh badan pembuat undang-undang, pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislative.

---

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5

¹⁴ Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas lib.ugm.ac.id*, diakses pada tanggal 20 Maret 2021

- 2) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
  - 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.
- b. Upaya penegakan hukum secara represif, penegakan hukum ini adalah penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyidikan sampai akhir penyidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah:
- 1) Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentuakn dapat atau tidaknya dilakukan penyidik.
  - 2) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - 3) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.
  - 4) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapanya.

- 5) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
- 6) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan.
- 7) Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum¹⁵

F. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---

¹⁵*Ibid*

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian yaitu secara deskriptif, yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fokus penelitian ini. Lalu dengan menjelaskan data yang didapat, lalu mengambil kesimpulan dengan logis.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁶ Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.¹⁷

3. Tipe Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu membandingkan norma-norma

---

¹⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-3, Bayumedia Publishing, Malang, 2010. hlm. 105

¹⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2010. hlm. 66

yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.¹⁸

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁹ Populasi yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah Kanit Idik 1 Satresnarkoba, Kasat Resnarkoba dan Propam Polres Tanjab Barat.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.²⁰ Sampel dalam penelitian ini adalah Teknik Penarikan Sampel dengan cara purposive sampling :

1. Kanit Idik 1 Satresnarkoba.

---

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 12

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, 2007. hlm. 118

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.159-160

2. Kasat Resnarkoba.
3. Propam Polres Tanjung Jabung Barat

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara ini, penulis mengambil dari sampel dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling diterapkan apabila penulis benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk ke dalam sampel yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel.²¹

b. Studi Dokumen,

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

---

²¹ *Ibid*

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu dijelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang terbagi dalam setiap bab agar mempermudah penulisan, dan terdapat keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Secara garis besar skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika dan Kepolisian Republik Indonesia. Pada bab ini berisi mengenai tinjauan secara umum mengenai Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Penegakan Hukum, Tinjauan Tindak Pidana, Narkotika dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang merupakan bagian pokok dari seluruh isi penelitian yaitu mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

BAB IV Penutup Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.